



MODEL SINERGITAS SATPOL PP DAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TAWURAN REMAJA: STUDI KUALITATIF DI KECAMATAN MEDAN BELAWAN

Putri Wardani¹, Gradiana Tefa^{2*}

¹ Pemerintah Kota Medan, Jl. Kapten Maulana Lubis No 1 Medan, Indonesia

² Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno No.20, Sumedang, Indonesia

wawardaniwa2002@gmail.com¹, gradiana_tefa@ipdn.ac.id^{2*}

**Corresponding author*

Received: 22-06-2026, Accepted: 31-08-2026; Published Online: 13-09-2026

ABSTRAK

Fenomena tawuran remaja merupakan permasalahan sosial yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Medan Belawan. Faktor seperti tingginya jumlah remaja, keterbatasan pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi memicu konflik antar kelompok. Penanganannya memerlukan sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sinergitas kedua instansi dalam upaya preventif tawuran remaja, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis dampaknya terhadap potensi terjadinya tawuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-induktif. Informan dipilih secara purposive yang terdiri dari aparat Satpol PP, anggota Kepolisian, serta tokoh masyarakat di Kecamatan Medan Belawan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif dengan mengacu pada teori sinergitas Doctoroff yang meliputi dimensi komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian telah berjalan melalui koordinasi, komunikasi, serta patroli gabungan dalam pencegahan tawuran remaja. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena belum adanya SOP bersama, keterbatasan sumber daya manusia serta koordinasi yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan SOP bersama, serta pengembangan sistem komunikasi dan pelaporan terintegrasi guna meningkatkan efektivitas upaya preventif secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan memiliki peran penting dalam upaya preventif tawuran remaja di Kecamatan Medan Belawan melalui pendekatan komunikasi, patroli gabungan, dan pembinaan masyarakat secara kolaboratif.

Kata Kunci: Sinergitas, Satpol PP, Kepolisian, Tawuran Remaja

ABSTRACT

Juvenile brawls represent a social problem that disrupts public security and order in Medan Belawan District. Factors such as the high number of adolescents, limited access to education, and socio-economic conditions trigger inter-group conflicts. Addressing this issue requires synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Belawan Port Police Resort. This study aims to describe the implementation of synergy between these institutions in preventive efforts against juvenile brawls, identify supporting and inhibiting factors, and analyze its impact on reducing the potential for such conflicts. This study employs a qualitative approach with a descriptive-inductive method. Informants were selected purposively, consisting of Satpol PP officers, police personnel, and community leaders in Medan Belawan District. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing using Doctoroff's synergy theory, which includes communication, feedback, trust, and creativity dimensions. The results indicate that the synergy between Satpol PP and the police has been implemented through coordination, communication, and joint patrols in preventing juvenile brawls. However, the implementation is not yet optimal due to the absence of joint standard operating procedures, limited human resources and facilities, and suboptimal coordination. Therefore, strengthening cross-sector coordination, establishing joint SOPs, and developing integrated communication and reporting systems are recommended to enhance the effectiveness of preventive efforts sustainably. This study concludes that the synergy between Satpol PP and the Belawan Port Police Resort plays an important role in preventive efforts against juvenile brawls in Medan Belawan District through communication, joint patrols, and collaborative community-based approaches.

Keywords: *Synergy, Civil Service Police, Police, Juvenile Brawls*

PENDAHULUAN

Tawuran remaja merupakan konflik sosial yang mengganggu stabilitas, menciptakan rasa tidak aman, dan berpotensi menghambat pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. (World Health Organization, 2024) menyebutkan kekerasan sebagai penyebab utama kematian usia 10–29 tahun, sementara (UNICEF, 2021) menegaskan tekanan sosial dan lingkungan meningkatkan kerentanan remaja terhadap tindakan agresif. Pencegahan konflik ini memerlukan pendekatan kolaboratif melalui penguatan lingkungan masyarakat, bukan hanya penegakan hukum.

Di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, tawuran merupakan konflik sosial berulang sejak 1970-an yang berkembang turun-temurun dan meluas ke berbagai wilayah, menciptakan tingkat kerawanan sosial yang tinggi. Kerawanan ini diperkuat oleh tingginya populasi usia muda; data (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2025) mencatat kelompok usia 15–24 tahun mencapai 21.868 jiwa (19,7% dari total 110.978 jiwa).

Fenomena ini terus berlanjut. Data Polres Pelabuhan Belawan mencatat 51 kejadian tawuran sepanjang 2024–2025 dengan pelaku berusia 12–35 tahun. Puncaknya terjadi pada Mei 2025 dengan 26

kasus yang melibatkan senjata tajam, bom molotov, penjarahan, serta memakan korban luka hingga meninggal dunia. Kondisi ini membuktikan bahwa tawuran di Medan Belawan telah menjadi konflik sosial berulang yang mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tabel 1. Rekapitulasi Konflik Tawuran di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan Tahun 2024-2025

Ta-hun	Jumlah Ke-jadian	Rentang Usia Pelaku	Dampak Utama
2024	13 Ke-jadian	15-35 Tahun	Korban Luka, Penggunaan Senjata Tajam dan Panah
2025	38 Ke-jadian	12-24 Tahun	Korban Meninggal Dunia, Bom Molotov
Total	51 Ke-jadian	12-35 Tahun	Ancaman Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sumber: (Polres Pelabuhan Belawan, 2025).

Rentang usia pelaku (12–35 tahun) memerlukan batasan konseptual. Istilah "remaja" mengacu pada rentang usia 12–24 tahun merujuk pada WHO (2024) dan UNICEF (2021). Pelaku berusia 25–35 tahun dipahami bukan sebagai pelaku utama, melainkan aktor tambahan (provokator, alumni, atau jaringan sosial) yang memobilisasi remaja. Pembedaan ini penting agar penelitian fokus pada sinergitas kelembagaan dalam mencegah keterlibatan remaja, tanpa mengabaikan

pengaruh jaringan usia lebih tua pada konflik turun-temurun di Kecamatan Medan Belawan.

Tawuran yang terus berulang menunjukkan pendekatan represif belum memadai, sehingga diperlukan upaya preventif berkelanjutan melalui sinergitas antarinstansi. Satpol PP dan Kepolisian memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam menjaga ketertiban umum. Menurut (Doctoroff, 1977) sinergitas dibangun melalui komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas.

Penelitian terdahulu telah membahas peran kelembagaan, kemitraan, dan koordinasi umum (Sikumbang, 2023; Paramaswasti et al., 2023; Rosadi & Putra, 2025; Perdana, 2022; Saputra et al., 2024). Namun, belum ada yang mengkaji implementasi sinergitas preventif pada wilayah dengan konflik sosial turun-temurun (*hereditary conflict area*) yang melibatkan jaringan aktor lintas usia. Celah penelitian (*research gap*) inilah yang hendak diisi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis sinergitas Satpol PP dan Polres Pelabuhan Belawan dalam upaya preventif tawuran remaja di wilayah rawan sosial. Penelitian ini menggunakan dimensi Doctoroff (1977) sekaligus menekankan bahwa keberhasilan pencegahan juga dipengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dan kerentanan

remaja. Kontribusi utamanya adalah memperluas teori Doctoroff (1977) ke dalam konteks konflik sosial berbasis wilayah dan lintas generasi.

Pertanyaan penelitian yang dirumuskan meliputi: (1) bagaimana implementasi sinergitas Satpol PP dan Kepolisian ditinjau dari dimensi komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas? (2) faktor apa saja yang mendukung dan menghambat sinergitas tersebut? serta (3) sejauh mana dampaknya terhadap pengendalian potensi tawuran remaja secara berkelanjutan?

Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergitas Satpol PP dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam upaya preventif tawuran remaja di Kecamatan Medan Belawan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menganalisis dampaknya terhadap potensi tawuran.

KAJIAN TEORI

Sinergitas merupakan proses kerja sama yang menghasilkan keluaran lebih besar dibandingkan apabila setiap pihak bekerja secara terpisah (Doctoroff, 1977). Dalam konteks pemerintahan, sinergitas diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Setiawan, 2023).

Penelitian ini menggunakan teori sinergitas Doctoroff (1977) yang dianalisis melalui empat dimensi utama: komunikasi (proses pertukaran informasi), umpan balik (respons evaluasi dan perbaikan), kepercayaan (keyakinan atas kemampuan, komitmen, dan integritas mitra), serta kreativitas (kemampuan mengembangkan gagasan, strategi, dan inovasi).

Dalam penelitian ini, keempat dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam upaya preventif tawuran remaja. Melalui komunikasi efektif, umpan balik responsif, kepercayaan kuat, dan kreativitas program, kedua instansi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan gangguan ketertiban umum.

Untuk memperdalam analisis, teori Doctoroff (1977) disandingkan dengan kerangka kolaborasi kontemporer. (Ansell & Gash, 2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* ditentukan oleh riwayat hubungan, insentif keterlibatan, keseimbangan kekuasaan, kepemimpinan pemfasilitas, dan dialog tatap muka (Emerson et al., 2012) menegaskan bahwa rezim kolaborasi mencakup keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas bertindak kolektif yang berdampak nyata. Kedua kerangka ini digunakan untuk

membedakan antara aktivitas koordinasi rutin dengan efektivitas koordinasi yang menghasilkan perubahan terukur pada penanganan tawuran.

Karena sinergitas melibatkan aparat keamanan dan masyarakat sipil, kajian teori diperkuat dengan pendekatan *community policing*. (Cordner, 1998) menjelaskan tiga elemen utamanya: kemitraan masyarakat, pemecahan masalah berbasis lokasi, dan transformasi organisasi yang responsif dan berorientasi pencegahan. Pendekatan ini relevan untuk menjelaskan patroli gabungan, peran kepala lingkungan, dan program seperti Belawan Berkah. Selain itu, (Morrel-Samuels et al., 2016) menegaskan bahwa keterlibatan komunitas dalam pencegahan kekerasan remaja perlu disesuaikan dengan konteks sosial setempat melalui kepercayaan, transparansi, komunikasi, dan komitmen.

Upaya preventif merupakan tindakan mencegah pelanggaran, gangguan, atau konflik sebelum terjadi (Paramaswasti et al., 2023). Dalam konteks tawuran remaja, upaya ini diarahkan pada pengurangan faktor risiko melalui pengawasan, pembinaan, patroli, sosialisasi, dan pelibatan masyarakat. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena berupaya mengurangi penyebab konflik, bukan sekadar menangani akibat.

Berdasarkan uraian tersebut, teori sinergitas Doctoroff digunakan sebagai

landasan analisis untuk memahami bagaimana komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas diwujudkan dalam sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam upaya preventif tawuran remaja di Kecamatan Medan Belawan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif induktif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam upaya preventif tawuran remaja di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif para informan dan kondisi yang terjadi di lapangan (Creswell, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dengan lokasi observasi meliputi titik-titik rawan tawuran yang menjadi wilayah kerja Satpol PP Kota Medan dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan. Pengumpulan data berlangsung selama empat bulan, yaitu antara Oktober 2025 hingga Januari 2026, mencakup masa observasi lapangan, wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumentasi kegiatan.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive dengan kriteria: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan upaya preventif tawuran remaja, (2) memiliki masa tugas atau pengalaman di wilayah Medan Belawan minimal satu tahun, dan (3) bersedia memberikan keterangan secara sukarela setelah memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 12 informan yang terdiri atas enam aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan (Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta tiga personel lapangan), empat personel Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan (Kasat Samapta, Kasat Binmas, Kabag Ops, dan satu Bhabinkamtibmas), serta dua tokoh masyarakat di Kecamatan Medan Belawan.

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

Kode	Jabatan/Peran	Instansi	Masa Tugas di Wilayah
I-1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP Kota Medan	> 3 tahun
I-2 s.d. I-6	Sekretaris, Kabid Trantibum, dan perso-	Satpol PP Kota Medan	1–3 tahun

	nel lapangan Satpol PP		
I-7 s.d. I-10	Kasat Samapta, Kasat Binmas, Kabag Ops, dan Bhabinkamtibmas	Polres Pelabuhan Belawan	1–4 tahun
I-11 s.d. I-12	Tokoh masyarakat	Kecamatan Medan Belawan	> 10 tahun berdomisili

***Kode informan digunakan untuk menjaga anonimitas identitas narasumber.**

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (semi-structured in-depth interview), yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan pokok mengenai empat dimensi sinergitas Doctoroff, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban secara mendalam sesuai pengalaman di lapangan. Setiap wawancara berlangsung sekitar 45–60 menit dan direkam dengan persetujuan informan, kemudian ditranskripsi secara verbatim. Observasi dilakukan secara partisipatif-pasif pada kegiatan rapat koordinasi, patroli gabungan, serta program pembinaan remaja, sedangkan dokumentasi mencakup notulen rapat, laporan kegiatan, serta foto kegiatan lapangan.

Data hasil wawancara dianalisis melalui pengodean (*coding*) dua tahap, yaitu open coding untuk mengidentifikasi kata kunci dan pola jawaban informan,

dilanjutkan dengan axial coding untuk mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam empat dimensi sinergitas Doctoroff serta kategori faktor pendukung, penghambat, dan dampak. Karena penelitian ini melibatkan kutipan wawancara dan dokumentasi kegiatan yang bersinggungan dengan remaja, prosedur etika penelitian turut diperhatikan melalui: (1) permintaan persetujuan (*informed consent*) secara lisan maupun tertulis sebelum wawancara dan pengambilan dokumentasi dilakukan; (2) anonimisasi identitas informan dengan menggunakan jabatan atau kode, bukan nama pribadi; serta (3) penyamaran wajah dan identitas remaja yang muncul dalam dokumentasi kegiatan pembinaan untuk melindungi privasi dan kepentingan terbaik anak.

Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam upaya preventif tawuran

remaja di Kecamatan Medan Belawan, penelitian ini menggunakan teori sinergitas menurut Doctoroff (1977) yang terdiri atas empat dimensi, yaitu komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kedua instansi membangun kerja sama dalam mencegah terjadinya tawuran remaja.

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan fondasi utama dalam membangun sinergitas antarorganisasi karena menentukan bagaimana informasi dipertukarkan, keputusan diambil, dan tindakan bersama dilaksanakan. Dalam konteks pencegahan tawuran remaja di Kecamatan Medan Belawan, komunikasi memiliki peran yang sangat strategis mengingat karakteristik konflik yang terjadi cenderung berulang, berpindah lokasi, serta melibatkan kelompok remaja yang mampu beradaptasi terhadap pola pengawasan aparat. Kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme komunikasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga mampu menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan.

Pola komunikasi yang dibangun antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan tidak terbatas pada hubungan antarinstansi semata, tetapi berkembang menjadi komunikasi lintas sektor yang

melibatkan kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan, serta unsur kewilayahan lainnya. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan tawuran remaja dipahami sebagai persoalan sosial yang memerlukan respons kolektif, bukan hanya persoalan keamanan yang menjadi tanggung jawab aparat penegak ketertiban.

Salah satu bentuk komunikasi yang paling dominan adalah pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin. Forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi perkembangan situasi keamanan, serta menyusun langkah-langkah pencegahan yang akan dilaksanakan bersama. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan menegaskan bahwa koordinasi dengan Polres Pelabuhan Belawan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya membangun sinergitas dalam pencegahan tawuran remaja.

“Dalam membangun sinergitas dengan Polres Pelabuhan Belawan tentunya kami rutin melaksanakan rapat koordinasi.” (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, wawancara, 5 Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi formal melalui rapat koordinasi telah menjadi instrumen utama dalam menjaga kesinambungan kerja sama kedua instansi. Rapat tidak hanya dilakukan sebagai agenda administratif,

tetapi menjadi sarana untuk menyusun strategi operasional berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi di lapangan. Sekretaris Satpol PP Kota Medan menjelaskan bahwa rapat koordinasi biasanya dilaksanakan ketika terjadi peningkatan potensi tawuran dan melibatkan berbagai unsur pemerintahan di tingkat wilayah.

Materi yang dibahas dalam rapat koordinasi juga menunjukkan adanya komunikasi yang bersifat substantif. Pembahasan tidak hanya berfokus pada kejadian yang telah terjadi, tetapi mencakup identifikasi titik rawan tawuran, waktu yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi, pola pergerakan kelompok remaja, kebutuhan personel, hingga pembagian tugas dalam pelaksanaan patroli gabungan. Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Medan menjelaskan bahwa rapat koordinasi digunakan untuk membahas lokasi rawan, jam rawan, pola pergerakan kelompok remaja, serta langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan bersama.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi yang dibangun telah melampaui fungsi pertukaran informasi dan berkembang menjadi mekanisme pengambilan keputusan bersama (Hakiki et al., 2022). Dengan adanya penyamaan persepsi sebelum kegiatan lapangan dilaksanakan, potensi terjadinya tumpang tindih tugas maupun kesalahpahaman

antarinstansi dapat diminimalkan. Hal ini penting karena efektivitas upaya preventif sangat bergantung pada kemampuan aparat untuk bertindak secara cepat dan terkoordinasi ketika menerima informasi mengenai potensi tawuran.

Meskipun komunikasi anta-rinstansi berjalan intensif, penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat standar operasional prosedur (SOP) bersama yang secara khusus mengatur mekanisme penanganan tawuran remaja. Ketiadaan SOP tersebut tidak menghambat koordinasi di lapangan; Satpol PP dan Kepolisian tetap menjalankan tugas berdasarkan kewenangan masing-masing yang diselaraskan melalui kesepakatan hasil koordinasi.



Gambar 1. Rapat Koordinasi

Sumber : (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, 2026).

Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Medan menjelaskan bahwa ketiadaan SOP khusus disikapi dengan mengacu pada pedoman internal masing-masing instansi serta hasil koordinasi yang disepakati. Pandangan serupa disampaikan oleh Kasat Samapta

Polres Pelabuhan Belawan yang menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berpedoman pada aturan internal dan pembagian peran yang disepakati sebelumnya.

Selain komunikasi formal melalui rapat koordinasi, komunikasi operasional sehari-hari bergantung pada media digital. Grup WhatsApp menjadi sarana utama untuk menyampaikan informasi secara cepat mengenai potensi tawuran maupun gangguan ketertiban, sehingga informasi dari kepala lingkungan, masyarakat, kecamatan, Satpol PP, hingga Kepolisian dapat diterima secara bersamaan.

Sekretaris Satpol PP Kota Medan menjelaskan bahwa grup WhatsApp dipilih karena mampu menjangkau pimpinan dan unsur kewilayahan secara cepat dan praktis. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kasat Binmas Polres Pelabuhan Belawan yang menyatakan bahwa grup WhatsApp digunakan untuk mempercepat penyampaian informasi mengenai lokasi dan perkembangan situasi tawuran di Medan Belawan.

Penggunaan media komunikasi digital ini menunjukkan proses koordinasi yang tidak lagi bergantung pada birokrasi formal. Informasi dapat ditindaklanjuti tanpa prosedur administratif; dalam konteks pencegahan tawuran yang membutuhkan respon cepat, grup WhatsApp berfungsi sebagai sistem peringatan dini

informal untuk tindakan preventif sebelum konflik menjadi bentrokan terbuka.

Tabel 3. Media Komunikasi dalam Sinergitas Satpol PP dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan

Media Komu- nikasi	Pengguna	Fungsi
Rapat koordinasi	Satpol PP, Polres, Kecamatan, Kelurahan	Penyamaan persepsi dan perencanaan kegiatan
Grup WhatsApp	Pimpinan dan unsur kewilaya- han	Penyampaian informasi ce- pat
Apel gabungan	Personel lapangan	Penyampaian arahan operasional
Komu- nikasi langsung	Pimpinan instansi	Pengambilan keputusan ce- pat

Sumber: (Hasil Penelitian, 2026).

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dimensi komunikasi dalam sinergitas antara Satpol PP Kota Medan dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dapat dinilai berjalan secara efektif. Intensitas komunikasi yang tinggi, keterlibatan berbagai unsur kewilayahan, kemampuan beradaptasi melalui pemanfaatan media digital, serta kesamaan persepsi yang dibangun melalui rapat koordinasi telah mendukung pelaksanaan upaya preventif tawuran remaja di Kecamatan Medan

Belawan. Temuan ini memperkuat pandangan Doctoroff (1977) bahwa komunikasi merupakan prasyarat utama terbentuknya sinergitas organisasi, sekaligus sejalan dengan penelitian Rosadi dan Putra (2025) yang menempatkan komunikasi sebagai faktor penting dalam keberhasilan kerja sama antarinstansi dalam penyelenggaraan ketertiban umum. Namun demikian, penyusunan pedoman operasional bersama tetap diperlukan untuk memperkuat konsistensi koordinasi dan memberikan kepastian mekanisme kerja dalam menghadapi dinamika konflik yang terus berkembang.

B. Umpan Balik

Dalam teori sinergitas Doctoroff (1977), umpan balik merupakan mekanisme untuk menilai efektivitas tindakan sekaligus menjadi dasar langkah perbaikan berikutnya. Pada konteks pencegahan tawuran remaja di Kecamatan Medan Belawan, umpan balik tercermin dari kemampuan Satpol PP Kota Medan dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam merespons laporan masyarakat, melaksanakan patroli gabungan, serta meng evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Karakteristik tawuran di Medan Belawan yang berulang dan berpindah-pindah lokasi menuntut respons cepat dan terkoordinasi guna mencegah bentrokan terbuka, korban jiwa, maupun kerugian

material. Oleh karena itu, sistem umpan balik antara Satpol PP dan Kepolisian berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi sekaligus instrumen pengambilan tindakan cepat terhadap potensi gangguan ketertiban (Fahmi et al., 2022).

Pelaksanaan umpan balik diawali melalui patroli gabungan rutin di wilayah rawan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan menjelaskan bahwa patroli dilaksanakan setiap hari dengan menyisir daerah rawan tawuran yang melibatkan personel Satpol PP dan Polres Pelabuhan Belawan secara bersama-sama. Kehadiran personel di lapangan menjadi bentuk pencegahan awal untuk mengurangi peluang bentrokan antar kelompok remaja.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Medan yang menjelaskan bahwa pola respons dimulai dari deteksi informasi awal di wilayah, lalu dilanjutkan pengerahan personel ke titik rawan. Fokus utama patroli meliputi pengamanan, pembubaran kerumunan, pemberian imbauan, dan pencegahan potensi konflik sejak dini.

Kasat Samapta Polres Pelabuhan Belawan menambahkan bahwa informasi dari anggota lapangan, Bhabinkamtibmas, kepala lingkungan, maupun masyarakat segera ditindaklanjuti melalui patroli gabungan kendaraan roda dua dan roda

empat ke lokasi rawan. Pola ini menunjukkan bahwa sistem umpan balik menempatkan respons cepat sebagai bagian utama strategi pencegahan tawuran.



Gambar 2. Patroli Gabungan Satpol PP Kota Medan dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam Pencegahan Tawuran Remaja

Sumber: (Satpol PP Kota Medan, 2026).

Kecepatan respons tersebut tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi awal mengenai potensi tawuran. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepala lingkungan, tokoh masyarakat, dan warga sekitar berperan penting sebagai sumber informasi yang membantu aparat mendeteksi potensi konflik sebelum berkembang menjadi tawuran terbuka. Informasi biasanya disampaikan melalui telepon maupun grup WhatsApp yang menghubungkan perangkat wilayah dengan Satpol PP dan Kepolisian.

Tokoh masyarakat Kecamatan Medan Belawan menjelaskan bahwa apabila terdapat tanda-tanda tawuran, informasi segera diteruskan kepada kepala lingkungan untuk disampaikan kepada aparat terkait. Menurutnya, penggunaan telepon dan grup WhatsApp mempercepat

penyampaian informasi dibanding mekanisme konvensional. Pandangan serupa disampaikan oleh masyarakat yang menyatakan laporan diberikan ketika terlihat kelompok remaja mulai berkumpul atau membawa senjata tajam.

Keberadaan masyarakat sebagai sumber informasi memperlihatkan bahwa sistem umpan balik pencegahan tawuran tidak hanya dibangun antarinstansi, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai mekanisme deteksi dini. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan tawuran dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat sehingga informasi yang diperoleh dapat segera ditindaklanjuti.

Meskipun sebagian besar laporan dapat direspons dengan cepat, efektivitas tindakan di lapangan masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa aparat biasanya datang dalam waktu yang relatif singkat setelah menerima laporan. Namun, kelompok remaja yang terlibat tawuran sering kali membubarkan diri atau berpindah lokasi ketika mengetahui kehadiran aparat. Akibatnya, situasi yang berhasil dikendalikan pada satu titik kerap kembali muncul di lokasi lain dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa

pelaku tawuran cenderung menghindari aparat dan memanfaatkan perpindahan lokasi untuk melanjutkan aksinya.



Gambar 3. Tindak Lanjut Informasi Potensi Tawuran oleh Tim Gabungan Satpol PP dan Kepolisian

Sumber: (Polres Belawan, 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa umpan balik yang diberikan oleh Satpol PP dan Kepolisian telah berjalan efektif dalam aspek operasional karena mampu merespons laporan secara cepat dan mencegah eskalasi konflik pada saat tertentu. Namun demikian, efektivitas tersebut masih bersifat sementara karena belum mampu menghilangkan faktor-faktor sosial yang menjadi penyebab berulangnya tawuran remaja di Kecamatan Medan Belawan.

Tabel 4. Mekanisme Umpan Balik dalam Pencegahan Tawuran Remaja

Tahapan	Bentuk Kegiatan
Deteksi awal	Informasi dari masyarakat, kepling, dan Bhabinkamtibmas
Penyampaian informasi	WhatsApp, telepon, laporan lapangan
Respon awal	Patroli gabungan menuju lokasi
Tindakan preventif	Himbauan, pembubaran kerumunan, penjagaan titik rawan
Evaluasi	Analisis dan evaluasi (Anev) pascakegiatan

Sumber: (Hasil Penelitian, 2026).

Selain melalui patroli dan tindak lanjut laporan masyarakat, umpan balik tercermin dalam mekanisme pelaporan dan evaluasi kegiatan yang berkelanjutan. Satpol PP menyampaikan laporan preventif secara berjenjang kepada pimpinan, sedangkan Kepolisian menggunakan laporan tertulis, laporan cepat WhatsApp, dan sistem pelaporan operasional Polri.

Pelaporan tersebut menjadi dasar analisis dan evaluasi (anev). Kasat Samapta Polres Pelabuhan Belawan menjelaskan bahwa evaluasi mengidentifikasi efektivitas patroli, lokasi rawan, kebutuhan personel, serta perubahan pola pengamanan mengingat karakter tawuran yang dinamis dan berpindah-pindah. Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan memperkuat bahwa kekurangan dalam kegiatan menjadi bahan anev untuk meningkatkan efektivitas kegiatan berikutnya.

Mekanisme evaluasi menunjukkan sinergitas mencakup proses pembelajaran bersama. Informasi dari hasil patroli, laporan masyarakat, dan operasional digunakan sebagai dasar memperbaiki strategi pencegahan berikutnya.

Secara keseluruhan, dimensi umpan balik berjalan baik melalui respons laporan, patroli gabungan, dan evaluasi berkala yang aktif. Namun, tawuran yang terus berulang dan berpindah lokasi menunjukkan bahwa umpan balik ini lebih

efektif mengendalikan konflik jangka pendek daripada menyelesaikan akar masalah secara permanen. Temuan ini memperlihatkan efektivitas umpan balik juga ditentukan oleh kemampuan mengatasi faktor sosial yang mendorong keterlibatan remaja dalam tawuran.

C. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan unsur penting dalam membangun sinergitas karena menentukan tingkat keyakinan antar pihak terhadap kemampuan, komitmen, serta tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pencegahan tawuran remaja di Kecamatan Medan Belawan, kepercayaan menjadi fondasi yang memungkinkan Satpol PP Kota Medan dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan melaksanakan berbagai kegiatan secara terpadu tanpa dihambat oleh perbedaan kewenangan maupun kepentingan kelembagaan.

Tingginya intensitas tawuran yang terjadi di wilayah Medan Belawan menuntut adanya kerja sama yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga didasarkan pada hubungan kerja yang saling mempercayai. Situasi konflik yang berkembang secara cepat mengharuskan setiap instansi mampu merespons informasi dan mengambil tindakan dalam waktu singkat. Dalam kondisi demikian, kepercayaan menjadi faktor penting karena setiap keputusan yang diambil di

lapangan sering kali bergantung pada informasi yang diperoleh dari instansi lain maupun dari perangkat kewilayahan.

Kepercayaan yang terbangun antara Satpol PP Kota Medan dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan terlihat dari keterbukaan kedua instansi dalam berbagi informasi mengenai perkembangan situasi keamanan. Informasi yang diperoleh dari wilayah, baik melalui kepala lingkungan, perangkat kelurahan, masyarakat, maupun personel lapangan, disampaikan secara terbuka dan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan menjelaskan bahwa setiap informasi yang diterima terkait potensi tawuran selalu direspons secara cepat tanpa harus menunggu permintaan resmi dari pihak kepolisian.

“Dari kewilayahan sendiri selalu update kondisi di lapangan dan kami pun selalu respon cepat terkait keadaan di sana. Tanpa Polres Belawan menghubungi langsung juga kita selalu respon cepat dan jika Polres Belawan sudah menghubungi langsung berarti memang butuh bantuan personel dalam pengamanan dan juga pencegahannya.” (*Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, wawancara, 5 Januari 2026*).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin melampaui koordinasi administratif semata. Respons

yang diberikan tidak lagi bergantung pada prosedur birokrasi yang panjang, melainkan didasarkan pada keyakinan bahwa informasi yang diterima merupakan bagian dari upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi ini mencerminkan kepercayaan yang kuat dalam pertukaran informasi antarinstansi sehingga informasi dapat segera ditindaklanjuti sesuai kebutuhan lapangan.

Selain melalui pertukaran informasi, kepercayaan diwujudkan dalam bentuk dukungan sumber daya. Penanganan tawuran remaja di Medan Belawan memerlukan personel dan sarana operasional yang memadai, sehingga kedua instansi saling memberikan dukungan personel maupun kendaraan patroli sesuai kebutuhan situasi. Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Medan menjelaskan bahwa kedua instansi saling mengisi kebutuhan lapangan melalui pengerahan personel dan kendaraan dinas. Hal serupa disampaikan oleh Kasat Samapta Polres Pelabuhan Belawan yang menegaskan bahwa dukungan pengamanan dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan lokasi dan tingkat kerawanan.

Dukungan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan diwujudkan dalam tindakan nyata melalui penggunaan sumber daya bersama. Ketersediaan mengerahkan personel maupun sarana

operasional memperlihatkan keyakinan bahwa pencegahan tawuran merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dicapai secara individual. Dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, kemampuan saling mendukung sumber daya menjadi indikator penting dari kuatnya hubungan kerja yang terbangun.

Tabel 5. Bentuk Kepercayaan dan Dukungan Antarinstansi

Bentuk Kepercayaan	Implementasi di Lapangan
Berbagi informasi	Pertukaran informasi lokasi, jumlah massa, dan kondisi lapangan
Dukungan personel	Pengeralahan personel sesuai kebutuhan operasi
Dukungan sarana	Penggunaan kendaraan patroli dan sarana pendukung
Pembagian peran	Satpol PP pada ketertiban umum, Polres pada pengamanan dan penegakan hukum
Kesamaan tujuan	Fokus pada keamanan dan ketertiban masyarakat

Sumber: (Hasil Penelitian, 2026).

Kepercayaan yang terbangun terlihat dari pelaksanaan operasi lapangan yang berlangsung tanpa dominasi salah satu instansi. Dalam setiap patroli gabungan, kedua instansi menyepakati lokasi, rute, dan pembagian tugas sesuai kewenangan: Satpol PP berperan menjaga ketertiban umum, memberikan imbauan, dan memperkuat kehadiran aparat, sedangkan Kepolisian berperan dalam pengamanan, penyisiran lokasi rawan, serta penegakan hukum pidana.

Pola pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa perbedaan

kewenangan tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan kekuatan yang saling melengkapi dalam pencegahan tawuran. Kejelasan peran ini mengurangi potensi tumpang tindih tugas dan memperkuat koordinasi selama kegiatan berlangsung.

Temuan penting penelitian ini adalah tidak ditemukannya ego sektoral dalam hubungan kerja antara Satpol PP Kota Medan dan Polres Pelabuhan Belawan. Seluruh informan menyampaikan bahwa kegiatan lebih berorientasi pada tujuan bersama. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan menegaskan bahwa hubungan kerja terjalin harmonis dan saling melengkapi dalam menghadapi keterbatasan masing-masing instansi.

“Sinergitas yang terbangun sangat baik, kita sangat kompak dan tidak ada ego sektoral sama sekali untuk kepentingan masyarakat dan menjaga trantibum.” (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, wawancara, 5 Januari 2026).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kepercayaan antarinstansi tidak lagi dimaknai sebagai hubungan formal berbasis kewenangan semata, melainkan telah bertransformasi menjadi identitas kerja bersama. Hal ini sejalan dengan argumen Ansell dan Gash (2008) bahwa dialog tatap muka yang berulang mampu

menumbuhkan kepercayaan secara bertahap sehingga batas kelembagaan menjadi cair dalam praktik kerja sehari-hari.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Kasat Samapta Polres Pelabuhan Belawan yang menyatakan bahwa fokus utama kedua instansi adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan menonjolkan identitas kelembagaan. Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan juga menilai bahwa koordinasi yang terjalin berjalan aman, baik, dan efektif dalam mendukung kegiatan pencegahan tawuran secara bersama-sama.

Tingkat kepercayaan ini juga mendapat pengakuan dari masyarakat. Tokoh masyarakat dan warga menilai Satpol PP dan Kepolisian menunjukkan hubungan kerja yang kompak dan saling mendukung. Kehadiran bersama kedua instansi dalam pengamanan memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pencegahan aparat.

Meskipun demikian, masyarakat menilai kekompakan tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan tawuran di Medan Belawan karena sebagian remaja masih terlibat konflik. Temuan ini menunjukkan bahwa kuatnya kepercayaan antarinstansi merupakan faktor penting sinergitas, namun keberhasilannya tetap dipengaruhi faktor eksternal seperti kon-

disi sosial masyarakat, lingkungan pergaulan, dan budaya konflik yang berlangsung lama.

Secara keseluruhan, dimensi kepercayaan antara Satpol PP Kota Medan dan Polres Pelabuhan Belawan dikategorikan sangat kuat. Kepercayaan yang dibangun melalui keterbukaan informasi, dukungan sumber daya, pembagian peran yang jelas, serta minimnya ego sektoral menjadi fondasi penting upaya preventif. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sinergitas tidak hanya ditentukan mekanisme koordinasi formal, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan yang mendorong kedua instansi bekerja sebagai mitra dengan tujuan dan tanggung jawab yang sama.

D. Kreativitas

Dimensi kreativitas dalam teori sinergitas Doctoroff menekankan kemampuan organisasi mengembangkan gagasan, pendekatan, dan strategi baru untuk menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan secara konvensional. Dalam konteks pencegahan tawuran remaja di Kecamatan Medan Belawan, kreativitas menjadi aspek penting mengingat konflik dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pola pergaulan, lemahnya pengawasan keluarga, serta budaya konflik yang berlangsung lama.

Kondisi tersebut mendorong Satpol PP Kota Medan dan Kepolisian Resor

Pelabuhan Belawan untuk tidak hanya mengandalkan patroli dan pengamanan lapangan. Berbagai program inovatif dikembangkan dengan melibatkan sekolah, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur pemuda untuk membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya tawuran.

Salah satu bentuk kreativitas tersebut adalah pelaksanaan program Satpol PP Goes To School dan Police Goes To School melalui sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, serta penyampaian pesan ketertiban kepada siswa di sekolah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan menjelaskan bahwa setiap kegiatan pembinaan remaja selalu melibatkan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan karena penanganan tawuran membutuhkan keterlibatan lintas instansi.



Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tawuran Melalui Program Satpol PP Goes To School dan Police Goes To School

Sumber: (Satpol PP Kota Medan, 2026).



Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi

Pencegahan Tawuran Melalui Program Police Goes To School

Sumber: (Polres Pelabuhan Belawan, 2026).

Melalui program tersebut, siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai bahaya tawuran, tetapi juga dibekali pengetahuan dampak penyalahgunaan narkoba, kedisiplinan, serta pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Keunikan program ini terletak pada pembentukan Duta Trantibum yang dipilih berdasarkan rekomendasi sekolah. Duta tersebut diharapkan menjadi agen perubahan yang mengajak rekannya menjauhi perilaku menyimpang seperti bolos sekolah, narkoba, maupun tawuran.

Pendekatan kreatif lainnya terlihat melalui pelaksanaan Operasi Kasih Sayang secara rutin oleh tim gabungan Satpol PP dan Kepolisian. Kegiatan ini tidak berorientasi pada penindakan, melainkan pengawasan dan pembinaan pelajar di luar sekolah pada jam belajar maupun remaja yang berkumpul di lokasi rawan.

Operasi Kasih Sayang menunjukkan perubahan dari pendekatan represif ke preventif dan edukatif. Remaja yang ditemukan tidak langsung diperlakukan sebagai pelanggar, melainkan diberi imbauan, arahan, dan pembinaan. Pendekatan ini memungkinkan aparat membangun komunikasi lebih dekat dengan remaja sebelum konflik berkembang menjadi kekerasan.

Pelaksanaan patroli juga dilakukan secara humanis. Remaja yang berkumpul pada jam rawan diimbau secara persuasif untuk kembali ke rumah. Dalam beberapa kasus, aparat juga melakukan pembinaan lanjutan kepada remaja yang pernah terlibat tawuran guna mengubah perilaku mereka.

Kreativitas paling menonjol adalah pelaksanaan program Belawan Berkah setiap hari Jumat yang melibatkan Kepolisian, Satpol PP, kecamatan, tokoh agama, dan masyarakat. Kegiatan ini diwujudkan melalui dialog warga, imbauan kepada orang tua, pembinaan keagamaan, serta pemberian bantuan sosial.



Gambar 6. Dokumentasi Program Belawan Berkah

Sumber: (Polres Pelabuhan Belawan, 2025).

Program Belawan Berkah menunjukkan bahwa pencegahan tawuran tidak hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan kemanusiaan. Kehadiran aparat di tengah masyarakat dalam suasana yang lebih informal membantu membangun kedekatan emosional antara aparat dan

warga. Hubungan yang lebih dekat tersebut mempermudah proses penyampaian pesan-pesan pencegahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing.

Kreativitas lainnya terlihat dari pelaksanaan bimbingan rohani terhadap pelaku tawuran yang diamankan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan. Pelaku yang beragama Islam diberikan pembinaan oleh ustaz, sedangkan pelaku yang beragama Kristen mendapatkan pembinaan dari pendeta. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama beberapa hari dengan melibatkan orang tua pelaku sebagai bagian dari proses pembinaan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan tawuran tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai persoalan moral dan sosial yang membutuhkan pembentukan kesadaran dari dalam diri pelaku. Pelibatan keluarga dalam proses pembinaan juga menjadi langkah penting karena pengawasan orang tua memiliki pengaruh besar terhadap perilaku remaja setelah kembali ke lingkungan masyarakat.



Gambar 7.
Kunjungan kepada Remaja yang Terlibat Tawuran

Sumber: (Polres Pelabuhan Belawan, 2026).

Kegiatan pembinaan diperkuat melalui kunjungan langsung ke rumah remaja yang terlibat tawuran. Dalam kegiatan tersebut aparat bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan arahan kepada keluarga sekaligus mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap anak. Kunjungan rumah menjadi sarana untuk memahami kondisi sosial pelaku sekaligus memperkuat keterlibatan keluarga dalam proses pencegahan.

Tabel 6. Program Kreatif Pencegahan Tawuran Remaja

Program	Bentuk Kegiatan	Tujuan
Satpol PP Goes To School	Sosialisasi dan pembinaan siswa	Mencegah kenakalan remaja
Police Goes To School	Edukasi bahaya tawuran dan narkoba	Meningkatkan kesadaran hukum
Operasi Kasih Sayang	Pemantauan pelajar di luar sekolah	Mencegah perilaku menyimpang
Belawan Berkah	Kegiatan sosial dan keagamaan	Mendekatkan aparat dengan masyarakat
Bimbingan Rohani	Pembinaan pelaku tawuran	Membentuk kesadaran moral
Kunjungan Rumah	Pendekatan kepada keluarga pelaku	Memperkuat pengawasan orang tua

Sumber: (Hasil Penelitian, 2026).

Pelaksanaan berbagai program tersebut menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP Kota Medan dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan tidak hanya diwujudkan melalui koordinasi dan patroli gabungan, tetapi juga melalui kemampuan mengembangkan strategi yang menyesuaikan karakteristik sosial masyarakat Medan Belawan. Program-program tersebut mampu meredam potensi tawuran dalam jangka pendek dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan.

Perubahan perilaku remaja yang diharapkan belum sepenuhnya berlangsung secara permanen. Beberapa informan masyarakat menjelaskan bahwa setelah dilakukan pembinaan, kondisi biasanya menjadi lebih kondusif dalam beberapa waktu. Tawuran kemudian dapat muncul kembali karena pengaruh lingkungan, lemahnya pengawasan keluarga, serta masih kuatnya budaya balas dendam yang berkembang di sebagian kelompok remaja. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kreativitas program yang dibangun telah memberikan dampak positif, tetapi memerlukan dukungan yang lebih luas dari keluarga, sekolah, dan masyarakat agar hasilnya dapat bertahan dalam jangka panjang.

Pengembangan program Satpol PP Goes To School, Police Goes To School,

Operasi Kasih Sayang, Belawan Berkah, pembinaan rohani, dan kunjungan rumah menunjukkan bahwa upaya preventif tidak hanya berorientasi pada pengamanan, tetapi juga menyentuh aspek pendidikan, sosial, dan moral. Temuan ini memperluas hasil penelitian Paramaswasti et al. (2023) yang menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam mengurangi potensi tawuran remaja. Pelibatan keluarga dan tokoh agama juga memperkuat hasil penelitian (Safrotulloh & Alauddin, 2025) mengenai pentingnya peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembinaan remaja.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Sinergitas

Keberhasilan sinergitas Satpol PP Kota Medan dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam upaya preventif tawuran remaja didukung oleh sejumlah faktor penting, kendati masih dihadapkan pada berbagai hambatan yang menyebabkan masalah ini belum dapat diatasi secara permanen di Kecamatan Medan Belawan.

1. Faktor Pendukung Sinergitas:

- a. Kesamaan Tujuan: Kedua instansi memiliki landasan yang sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga mengesampingkan kepentingan kelembagaan demi tindakan bersama.

- b. Dukungan Pimpinan: Komitmen tinggi dari pimpinan mendorong rutinitas rapat koordinasi, pemanfaatan saluran komunikasi digital yang fleksibel, serta konsistensi pelaksanaan patroli gabungan.
- c. Program Inovatif Bersama: Kehadiran program seperti *Satpol PP/Police Goes To School*, *Operasi Kasih Sayang*, dan *Belawan Berkah* memperkuat sinergi melalui perpaduan pendekatan keamanan dan pendekatan sosial berbasis masyarakat.

2. Faktor Penghambat Sinergitas:

- a. Ketiadaan SOP Bersama: Belum tersedianya SOP khusus koordinasi penanganan tawuran membuat pelaksanaan tugas di lapangan masih sangat mengandalkan kesepahaman dan kesepakatan informal semata.
- b. Lemahnya Pengawasan Sosial: Rendahnya kesadaran masyarakat serta minimnya kontrol orang tua terhadap aktivitas anak pada malam hari membuat keterlibatan remaja dalam tawuran sering terlambat terdeteksi.
- c. Karakteristik Konflik dan Residivis Konflik: Tingginya kerentanan remaja terhadap provokasi, kuatnya solidaritas kelompok, dan ber-tahannya budaya balas dendam menyebabkan situasi kondusif yang diciptakan aparat cenderung bersifat

jangka pendek—tawuran sering kembali muncul atau berpindah lokasi setelah pengamanan usai.

F. Dampak Sinergitas terhadap Pengendalian Potensi Tawuran Remaja

Pelaksanaan sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan memberikan dampak positif terhadap pengendalian potensi tawuran remaja di Kecamatan Medan Belawan. Patroli gabungan dan berbagai kegiatan preventif yang dilakukan mampu membubarkan tawuran yang sedang berlangsung, mengurangi eskalasi konflik, serta menciptakan kondisi yang lebih kondusif di masyarakat (Putri & Rahman, 2023).

Selain itu, kegiatan kunjungan rumah dan pelibatan tokoh masyarakat juga meningkatkan keterlibatan keluarga dalam melakukan pengawasan terhadap remaja yang pernah terlibat tawuran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sinergitas kedua instansi memberikan kontribusi terhadap upaya pengendalian konflik sosial di wilayah penelitian.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak tersebut belum bersifat permanen. Tawuran masih sering muncul kembali pada waktu dan lokasi yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara, kelompok remaja yang terlibat tawuran cenderung menghindari keberadaan aparat sehingga muncul pola

“kucing-kucingan” dengan petugas. Akibatnya, meskipun konflik dapat dikendalikan dalam jangka pendek, potensi tawuran masih tetap ada dan dapat muncul kembali sewaktu-waktu.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan tawuran remaja tidak hanya ditentukan oleh kualitas sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat, pengawasan keluarga, dan perilaku remaja itu sendiri. Oleh karena itu, upaya preventif perlu didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat agar dampak yang dihasilkan dapat berlangsung secara lebih berkelanjutan.

G. Pembahasan: Dari Aktivitas Koordinasi menuju Efektivitas Koordinasi

Merujuk pada temuan pada bagian A hingga F, penting untuk membedakan secara eksplisit antara aktivitas koordinasi dan efektivitas koordinasi. Rapat rutin, grup WhatsApp, maupun patroli gabungan adalah bentuk aktivitas koordinasi yang dapat diamati secara langsung, namun keberadaannya belum otomatis membuktikan bahwa koordinasi tersebut berjalan efektif dalam arti menghasilkan penurunan kejadian tawuran secara nyata. Merujuk pada Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), efektivitas suatu rezim kolaborasi pemerintahan seharusnya dinilai dari dampak dan adaptasi nyata yang

dihasilkan, bukan sekadar intensitas aktivitas kolaboratif itu sendiri. Untuk itu, Tabel 7 berikut menyandingkan bentuk aktivitas koordinasi dengan indikator efektivitas, bukti empiris, dan hambatan yang ditemukan pada setiap dimensi sinergitas Doctoroff (1977).

Tabel 7. Matriks Aktivitas Koordinasi dan Efektivitas Koordinasi per Dimensi Sinergitas

Dimensi	Aktivitas Koordinasi (Bentuk)	Indikator Efektivitas	Bukti Empiris	Hambatan Utama
Komunikasi	Rapat koordinasi rutin, grup Whats App, apel gabungan	Kecepatan respons; ketepatan informasi lokasi & waktu rawan	Penyamaan persepsi sebelum patroli; informasi titik rawan tersampaikan real-time	Belum ada SOP komunikasi bersama yang baku
Umpan Balik	Patroli gabungan, anev cakegi atan	Waktu tanggap (response time); konsistensi patroli	Patroli harian menyisir titik rawan; anev mengidentifikasi lokasi lokasi baru	Efektivitas bersifat jangka pendek; pelaku berpindah lokasi (pola kucing-kucingan)

Kepercayaan	Berbagi informasi, dukungan personel/sarana, pembagian peran	Minimnya ego sektoral; kesiediaan berbagi sumber daya tanpa prosedur formal	Bantuan personel diberikan tanpa menunggu permintaan resmi	Keterangan pada hubungan personal, bukan mekanisme kelembagaan
Kreativitas	Program Goes To School, Operasi Kasih Sayang, Belawan Berkah, bimbingan rohani	Penurunan kejadian tawuran pasca program; keberlanjutan perubahan perilaku	Duta Tran-tibum ; pembinaan lintas agama; kunjungan rumah	Dampak belum permanen; bergantung pada pengawasan keluarga pascap rogram

Sumber: (Hasil Analisis Peneliti, 2026).

Matriks tersebut memperlihatkan bahwa keempat dimensi sinergitas telah terwujud secara konsisten dalam bentuk aktivitas, tetapi efektivitasnya paling menonjol pada aspek respons jangka pendekkecepatan tanggap, penyamaan persepsi, dan pembubaran kerumunan dan masih lemah pada aspek keberlanjutan dampak. Pola ini konsisten dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) bahwa keberhasilan kolaborasi sering kali

berkembang melalui “kemenangan-kemenangan kecil” (small wins) yang memperkuat kepercayaan, namun tanpa institusionalisasi melalui aturan formal, siklus tersebut rentan berhenti pada level operasional dan tidak berkembang menjadi perubahan struktural yang permanen.

Dialog antara temuan dan teori juga menegaskan relevansi pendekatan community policing (Cordner, 1998) dalam menjelaskan mengapa sinergitas ini berhasil membangun kedekatan emosional dengan Masyarakat melalui patroli humanis, Belawan Berkah, dan kunjungan rumah tetapi belum mengubah struktur risiko yang mendasari konflik. Sebagaimana ditekankan Morrel-Samuels et al. (2016), keterlibatan komunitas dalam pencegahan kekerasan remaja perlu ditopang oleh kepercayaan, transparansi, dan komitmen jangka panjang, bukan hanya kehadiran aparat pada momen-momen tertentu. Dengan demikian, sinergitas kelembagaan yang kuat perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas pengawasan.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satpol PP Kota Medan dan Polres Pelabuhan Belawan dalam upaya preventif tawuran remaja telah terwujud secara konsisten pada empat dimensi Doctoroff (1977) komunikasi lintas sektor, umpan balik (patroli dan evaluasi cepat), kepercayaan yang minim ego

sektoral, serta kreativitas program sosial-keagamaan (seperti Belawan Berkah dan *Goes To School*). Meski demikian, efektivitasnya masih bersifat jangka pendek karena belum sepenuhnya mengubah pola konflik turun-temurun yang kerap berulang di lokasi berbeda.

Kontribusi utama penelitian ini adalah memperluas teori Doctoroff melalui dialog kritis bersama kerangka *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012) dan *community policing* (Cordner, 1998), sekaligus menegaskan pentingnya membedakan aktivitas koordinasi dari efektivitas koordinasi pada konflik sosial lintas generasi.

Rekomendasi kebijakan yang diajukan meliputi:

1. Penyusunan SOP bersama antara Satpol PP dan Kepolisian dengan indikator kinerja terukur (kecepatan respons, konsistensi patroli, dan penurunan kejadian).
2. Penguatan pengawasan keluarga dan lingkungan melalui institusionalisasi program berbasis komunitas.
3. Integrasi sistem pelaporan digital lintas instansi untuk deteksi dini yang lebih sistematis.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus studi kasus tunggal di Kecamatan Medan Belawan dengan 12 informan, sehingga temuan belum tentu dapat digen-

eralisasi. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan indikator efektivitas koordinasi secara kuantitatif serta membandingkan pola sinergitas preventif pada beberapa wilayah konflik turun-temurun lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jop-art/mum032>
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2025). *Kecamatan Medan Belawan dalam angka 2025*. BPS Kota Medan.
- Cordner, G. (1998). Community policing: Elements and effects. In G. P. Alpert & A. Piquero (Eds.), *Community policing: Contemporary readings* (pp. 45–61). Waveland Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Doctoroff, M. A. (1977). *Synergistic management: Creating the climate for superior performance*. Amacom Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
<https://doi.org/10.1093/jop-art/mur011>
- Fahmi, F. A., , Azharisman Rozie, \, & Jalaludin, S. (2022). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kampar*. 4(1), 1–14.
- Hakiki, M., Eviany, E., Jalaludin, S., Provinsi, P., Barat, S., & Padang, K. (2022). *Penertiban Lapak Pedagang Kawasan Flyover*. 4(1), 70–87.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Morrel-Samuels, S., Bacallao, M., Brown, S., Bower, M., & Zimmerman, M. (2016). Community engagement in youth violence prevention: Crafting methods to context. *Journal of Primary Prevention*, 37(2), 189–207.
<https://doi.org/10.1007/s10935-016-0428-5>
- Paramaswasti, Y. B., Mediatati, N., & Nugraha, A. B. (2023). Upaya preventif dan represif pihak kepolisian dan sekolah dalam mengatasi tawuran antar pelajar. *JIIP (Jurnal*

- Ilmiah Ilmu Pendidikan*), 6(7), 5291–5300.
- Perdana, B. P. (2022). *Sinergitas Satpol PP dengan kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). *Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kampar*. 5(1), 1–24.
- Rosadi, O., & Putra, I. (2025). Sinergitas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dengan kepolisian dalam penyelenggaraan ketertiban umum. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 320–329.
<https://doi.org/10.31933/ztv5ps23>
- Safrotulloh, M., & Alauddin, D. (2025). The role of stakeholders in guidance for overcoming juvenile delinquency in Cirebon Regency. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 7(1), 20–41.
<https://doi.org/10.47453/eduprof.v7i1.285>
- Saputra, F., Maemun, H. F., Oktian, N. A. R., & Pertiwi, Y. W. (2024). Faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku tawuran pada siswa SMK di Kota Bekasi. *Jurnal Psikologi*, 1(4).
<https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2807>
- Sikumbang, Y. Y. (2023). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban kenakalan remaja di Kota Padangsidempuan*. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidempuan.
- UNICEF. (2021). *The state of the world's children 2021*.
- World Health Organization. (2024). *Youth violence*.